

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENERAPAN AKUNTANSI
 SEKTOR PUBLIK, PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS
 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA
 (Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Banyudono)**

Retno Putri Hastuti¹⁾, Hadi Samanto²⁾, Yuwita Ariessa Pravasanti³⁾
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia^{1,2,3)}
 E-mail: putrirtn27@gmail.com¹⁾
 E-mail: hadisamanto6110@gmail.com²⁾
 E-mail: yuwita.ariessa.pravasanti@gmail.com³⁾

Abstract

This study aims to analyze the effect of budget target clarity, public sector accounting implementation, and accounting control on the performance accountability of village government agencies in Banyudono District. The method used in this study is quantitative. Data were obtained from distributing questionnaires to predetermined respondents using saturated sampling techniques. Data analysis techniques used in this study include descriptive statistics of respondents, validity tests, reliability tests, classical assumption tests, and multiple linear regression analysis. The results of the study indicate that budget target clarity has a negative and significant effect on the performance accountability of government agencies with a calculated t of -4.655 which is absolutely greater than the t table of 1.658 and a significance of 0.000 < 0.05. The application of public sector accounting has a significant effect on the performance accountability of government agencies with a calculated t value of 5.640 > t table of 1.658 and a significance of 0.000 < 0.05. Accounting control has a significant influence on the performance accountability of government agencies, with a calculated t-value of 8.912 > t-table 1.658 and a significance level of 0.000 < 0.05).

Keywords: Accountability, Accounting Control, Budget Target Clarity, Implementation of Public Sector Accounting, Village Government

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tuntutan masyarakat terhadap transparansi, efektivitas penggunaan anggaran, dan pertanggung jawaban publik semakin meningkat seiring besarnya dana desa yang dialokasikan pemerintah setiap tahunnya. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang berpotensi menurunkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa.

Berdasarkan laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi, masih terdapat desa yang mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan, terutama terkait ketidakjelasan sasaran anggaran, keterlambatan pelaporan, serta lemahnya pengendalian internal. Fenomena tersebut juga ditemukan pada beberapa desa di Kecamatan Banyudono.

Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	Program penunjang urusan pemerintah	2.400.868.000	2.362.466.624	98.40

	ah daerah Kabupate n/Kota			
2	Program penyelen ggaraan pemerint ahan dan pelayana n publik	25.000. 000	25.00 0.000	100
	Program pemberd ayaan masyarak at desa dan keluraha n	75.000. 000	74.63 0.000	99.50
3	Program penyelen ggaraan urusan pemerint ahan umum	61.081. 000	59.30 5.000	97.09
	TOTAL	2.551.9 32.000	2.515 .815. 020	98.58

Sumber: LKjIP 2024

Pada LKjIP tahun 2024 terdapat sisa anggaran dari realisasi belanja tahun anggaran 2024 mencapai Rp 2.515.815.020,- atau 98,58% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 2.551.932.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 36.116.980,- atau sekitar 1,42%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran menjadi acuan agar sisa anggaran ini tidak disalahgunakan dan benar-benar mencerminkan efisiensi dan efektivitas kinerja.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik sehingga dapat dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran tersebut. Sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja pemerintah desa secara transparan dan objektif. Dengan adanya sasaran anggaran

yang jelas, maka pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, kejelasan sasaran anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa.

Selain permasalahan sasaran anggaran, kendala teknis dalam implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga masih sering terjadi di beberapa desa di Kecamatan Banyudono. Permasalahan seperti keterbatasan sumber daya manusia operator, kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, hingga adaptasi terhadap pembaruan sistem yang cepat menyebabkan terjadinya *human error* dalam pencatatan transaksi dan sinkronisasi data keuangan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan penyusunan dokumen laporan kinerja seperti LPPD dan LKjIP yang dapat mencapai ± 3 bulan dari batas waktu penyampaian laporan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi sektor publik masih memerlukan peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan sistem administrasi agar akuntabilitas kinerja dapat berjalan secara optimal.

Penerapan akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat. Akuntansi sektor publik mencakup proses pengukuran, pencatatan, pengikhtisaran, dan penyajian informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Melalui penerapan akuntansi sektor publik yang baik, pemerintah desa dapat menyediakan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan dapat diaudit sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Selain itu, penerapan akuntansi sektor publik juga dapat membantu pemerintah dalam menilai efektivitas penggunaan anggaran serta

mempermudah pengukuran capaian kinerja secara objektif.

Di sisi lain, sistem pengendalian akuntansi di tingkat desa juga masih menunjukkan berbagai kelemahan. Beberapa desa di Kecamatan Banyudono masih menghadapi permasalahan sistem pengendalian internal (SPI), seperti perangkapan jabatan, kurangnya kompetensi aparat desa, dan lemahnya pengawasan yang berpotensi menimbulkan fraud dalam pengelolaan Dana Desa. Pada Januari 2026 bahkan ditemukan kasus dugaan pemalsuan dokumen dan penyelewengan dana desa di Kabupaten Boyolali dengan kerugian negara mencapai Rp120.000.000. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian akuntansi yang belum optimal dapat menghambat terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah desa. Oleh sebab itu, pengendalian akuntansi menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

Kecamatan Banyudono dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki dinamika tata kelola pemerintahan desa yang aktif dan berkembang. Seluruh desa di Kecamatan Banyudono telah berada pada kategori Desa Maju dan Desa Mandiri sehingga menunjukkan stabilitas pembangunan desa yang cukup baik. Selain itu, Banyudono memiliki tingkat aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk yang relatif tinggi dibandingkan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Boyolali. Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Banyudono relevan untuk menguji bagaimana kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik, dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Loppies et al. (2023) serta Hawalya et al. (2025) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akan tetapi, Silastuti (2023) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Penelitian terkait penerapan akuntansi sektor publik yang dilakukan oleh Wiyana et al. (2023) dan Rondonuwu et al. (2023) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan Mubarak et al. (2021) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Sementara itu, penelitian mengenai pengendalian akuntansi oleh Setiawan & Ramdan (2024) serta Febriani (2023) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, namun berbeda dengan penelitian Hidayat et al. (2021) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan.

Adanya perbedaan hasil penelitian (*research gap*) serta fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa masih menjadi isu penting untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Banyudono.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2023), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian terdiri dari seluruh perangkat desa yang ada di masing-masing desa dengan komposisi jabatan yang relatif beragam, meliputi kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur umum dan perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan dan pelayanan, serta kepala dusun. Setiap desa umumnya memiliki jumlah

responden yang sama, yaitu 9 orang, namun terdapat beberapa desa dengan jumlah yang sedikit lebih rendah, yaitu 8 orang. Secara keseluruhan, total populasi penelitian yang diperoleh berjumlah 133 orang.

2.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana data kuantitatif ini untuk mengukur pengaruh antar variabel-variabel. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Menurut Putra (2021) data primer yang merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yaitu menggunakan kuesioner.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Uji Instrumen Penelitian

3.1.1. Uji Validitas

Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 119 responden dan besarnya df dapat dihitung $119 - 2 = 117$ dengan $df = 117$ dan $\alpha = 0,05$ didapat r tabel = 0,1801. Jadi, item pernyataan yang valid memiliki r hitung lebih besar dari 0,1801. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dikatakan valid terbukti dengan nilai r hitung $> r$ tabel, sehingga seluruh instrumen pada setiap variabel memenuhi kriteria aturan pada sistem pengukuran yang ada.

3.1.2. Uji Reliabilitas

Tabel 3.1 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	N of Items	Keterangan
KSA (X1)	0,905	0,70	8	Reliabel
PASP (X2)	0,908	0,70	9	Reliabel
PA (X3)	0,923	0,70	9	Reliabel
AKIP (Y)	0,942	0,70	12	Reliabel

Sumber: Output SPSS 23, 2026

Berdasarkan tabel 3.1 diketahui bahwa nilai masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* (α) lebih besar dari 0,70 maka jawaban dari responden pada kuesioner dinyatakan reliabel. Dengan demikian, syarat reliabilitas dari alat ukur terpenuhi.

3.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

3.2.1. Uji Normalitas

Tabel 3.2 Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual	Alpha	Keterangan
N	119		
Asymp.Sig. (2-tailed)	0,114	0,05	Normal

(2-tailed)

Sumber: Output SPSS 23, 2026

Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan bahwa nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,114 $> 0,05$, Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal atau lolos.

3.2.2. Uji Multikolinearitas

Tabel 3.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
KSA_X1	0,966	1,03	Tidak terjadi multikolinearitas
PASP_X2	0,952	1,05	Tidak terjadi multikolinearitas
PA_X3	0,970	1,03	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output SPSS 23, 2026

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dilihat bahwasanya nilai *tolerance* dan VIF dalam masing-masing variabel independen. Pada

variabel X1 yaitu kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai *tolerance* dan VIF sebesar 0,966 dan 1,035. Variabel X2 yaitu penerapan akuntansi sektor publik memiliki nilai *tolerance* dan VIF sebesar 0,952 dan 1,050. Variabel X3 yaitu pengendalian akuntansi memiliki nilai *tolerance* dan VIF sebesar 0,970 dan 1,031. Ketiga variabel independen tersebut yaitu tidak terjadi multikolonieritas, sehingga memenuhi syarat analisis model regresi.

3.2.3. Uji Autokorelasi

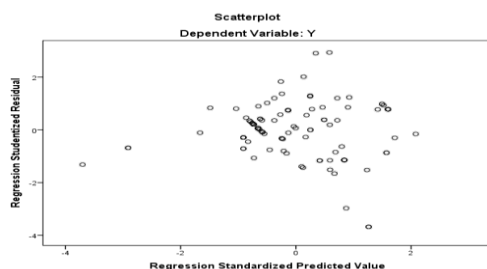
Tabel 3. 4 Hasil Uji Autokorelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Durbin Watson
0,332	0,110	0,092	2,019

Sumber: Output SPSS 23, 2026

Berdasarkan tabel 3.4 diketahui nilai Durbin-Watson dalam uji autokorelasi sebesar 2,019. Untuk mengetahui seberapa besar korelasinya, maka perlu diujikan pada rumus $dU < dW < 4-dU$. Diketahui nilai dU sebesar 1,7528 dan $4-dU$ ($4-1,7528$) sebesar 2,2472. Seperti yang diketahui apabila nilai dU Upper (dU) seharusnya lebih kecil yaitu 1,7528 dari nilai dW , sedangkan untuk nilai dW sendiri tidak boleh lebih besar dari $4-dU$, dimana hasil tersebut sebesar 2,2472. Sehingga saat diolah dalam rumus maka $1,7528 < 2,019 < 2,2472$ dan demikian dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

3.2.4. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. 1 Hasil Uji Scatterplot

Berdasarkan gambar 3.1 menunjukkan hasil *scatterplot* uji heteroskedastisitas yang dapat dideskripsikan sebagai berikut: Titik data tidak membentuk pola mengerucut (funnel), melebar, atau bergelombang.

Sebaliknya, mereka menyebar secara tidak acak di atas dan di bawah garis nol pada sumbu Y. Selain itu, sebaran residual hampir sama di sepanjang nilai prediksi. Ini menunjukkan bahwa model regresi tidak menunjukkan heteroskedastisitas karena varians residual cenderung konstan, yang dikenal sebagai homoskedastisitas. Maka dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas karena tidak ditemukan pola tertentu pada scatterplot residual.

3.3. Hasil Uji Hipotesis

3.3.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3. 5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Keterangan	Unstandardized	Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	8,022	2,371	3,383	0,001
KSA	-0,348	0,075	-4,655	0,000
PASP	0,594	0,105	5,640	0,000
PA	0,822	0,092	8,912	0,000

Sumber: Hasil Output SPSS 23, 2026

$$Y = 8,022 - 0,348.X_1 + 0,594.X_2 + 0,822.X_3 + \text{et}$$

Berdasarkan rumus di atas dapat diambil kesimpulan yang dijelaskan di bawah ini:

- Nilai konstanta α (nilai mutlak Y) = 8,022 artinya jika kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik, dan pengendalian akuntansi dianggap bernilai nol, maka nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperkirakan sebesar 8,022.
- Nilai koefisien variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) sebesar -0,348 yang berarti kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(Y) dengan tingkat persentase sebesar -34,8%. Jika nilai kejelasan sasaran anggaran mengalami penurunan 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami penurunan sebesar -0,348 dan sebaliknya.

- c. Nilai koefisien variabel penerapan akuntansi sektor publik (X2) sebesar 0,594 yang berarti penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) dengan tingkat persentase sebesar 59,4%. Jika nilai penerapan akuntansi sektor publik mengalami kenaikan 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami kenaikan sebesar 0,594 dan sebaliknya.
- d. Nilai koefisien variabel pengendalian akuntansi (X3) sebesar 0,822 yang berarti pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) dengan tingkat persentase sebesar 82,2%. Jika nilai penerapan pengendalian akuntansi mengalami kenaikan 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami penurunan sebesar 0,822 dan sebaliknya.

3.3.2. Uji F (Kelayakan Model)

Tabel 3. 6 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2465,428	3	821,809	143,816	0,000
Residual	657,144	11	5,714		
Total	3122,571	14			

Sumber: Output SPSS 23, 2026

Berdasarkan tabel 3.6 dapat diketahui nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung sebesar $143,816 > F$ tabel 2,68. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara variabel kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik, pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.3.3. Uji t (Uji Parsial)

Tabel 3. 7 Hasil Uji t

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.
Kejelasan Sasaran Anggaran	-4,655	1,658	0,000
Penerapan Akuntansi Sektor Publik	5,640	1,658	0,000
Pengendalian Akuntansi	8,912	1,658	0,000

Sumber: Output SPSS 23, 2026

Berdasarkan tabel 3.7 maka dapat diketahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independent secara parsial terhadap variabel dependen:

- a. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran (X1) memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar -4,655 yang secara absolut lebih besar dari t tabel sebesar 1,658 (t hitung $>$ t tabel) serta tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran, justru diikuti dengan penurunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai t

hitung sebesar $5,640 > t$ tabel $1,658$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan akuntansi sektor publik yang dimiliki maka semakin tinggi pula pertimbangan dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- c. Pengaruh pengendalian akuntansi (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar $8,912 > t$ tabel $1,658$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pengendalian akuntansi yang dimiliki maka semakin tinggi pula pertimbangan dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.3.4. Koefisien Determinasi

Tabel 3. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Mode		<i>R</i>	<i>Adjusted R</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	<i>R</i>	<i>Square</i>	<i>Square</i>	
1	0,889	0,790	0,784	2,390

Sumber: Output SPSS 23, 2026

Berdasarkan tabel 3.8 menunjukkan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) dengan diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,784. Artinya variabel kejelasan sasaran anggaran (X1), penerapan akuntansi sektor publik (X2), dan pengendalian akuntansi (X3) memiliki besaran pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) sebesar 78,4%, sedangkan 21,6% dipengaruhi oleh variabel eksternal lainnya.

3.4 Pembahasan

3.4.1. Kejelasan Sasaran Anggaran Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 3.5, variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) menunjukkan nilai t

hitung sebesar $-4,655 < t$ tabel $1,658$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa di Kecamatan Banyudono. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja diterima, namun dengan arah hubungan yang negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang tinggi tidak selalu meningkatkan akuntabilitas. Hal ini dapat terjadi karena kejelasan yang terlalu rinci dan kaku membuat aparatur desa lebih fokus pada pemenuhan target administratif dibandingkan pada hasil kinerja yang nyata. Dengan adanya tuntutan pencapaian target yang kaku, aparatur cenderung bekerja sesuai prosedur administratif tanpa memperhatikan efektivitas hasil. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan sasaran yang jelas tidak selalu dapat diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, kejelasan sasaran anggaran perlu diimbangi dengan fleksibilitas dan peningkatan kapasitas agar dapat meningkatkan akuntabilitas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzahrani (2024) yang menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara negatif dan signifikan, maka hipotesis ditolak. Semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran maka semakin menurun akuntabilitas kinerjanya. Sehingga adanya kejelasan sasaran anggaran tidak dapat mempermudah instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.4.2. Penerapan Akuntansi Sektor Publik Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa

Hasil uji parsial tabel 3.7 menunjukkan bahwa variabel penerapan akuntansi sektor

publik (X2) memiliki t hitung sebesar 5,640 > t tabel 1,658 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, dan koefisien regresi sebesar 0,419. Hal ini berarti bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan akuntansi sektor publik, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas kinerja yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena dengan adanya sistem pencatatan yang tepat, penyajian laporan keuangan yang transparan, serta penggunaan informasi keuangan yang akurat, aparat desa dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara lebih jelas dan terukur. Selain itu, dengan adanya penerapan akuntansi sektor publik yang baik, pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib, terkontrol, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, penerapan akuntansi sektor publik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja yang baik di lingkungan pemerintah desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tandibua' et al. (2024) yang menegaskan bahwa penerapan akuntansi sektor publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik semakin efektif dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah desa di Kecamatan Banyudono.

3.4.3. Pengendalian Akuntansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil uji regresi parsial tabel 3.7, variabel good governance (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 8,912 > t tabel 1,658 dengan signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,414. Hasil ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa di Kecamatan Banyudono. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin baik

pengendalian akuntansi yang diterapkan, maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena dengan adanya sistem pengendalian yang baik, seperti pengawasan, pemeriksaan internal, dan evaluasi yang sistematis, pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi yang baik, pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib dan meminimalisir penyimpangan, sehingga meningkatkan akuntabilitas.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Okvita (2022) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh dengan arah positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti, bahwa semakin baik pengendalian akuntansi yang diterapkan pemerintah maka semakin meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, semakin optimal pengendalian akuntansi yang diterapkan, maka semakin efektif pula dalam mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa, sedangkan penerapan akuntansi sektor publik dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa di Kecamatan Banyudono. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan akuntansi sektor publik dan pengendalian akuntansi, maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja yang dihasilkan.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya menggunakan variabel kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik, dan pengendalian akuntansi sehingga belum mencakup seluruh faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa. Selain itu, penelitian ini juga menghadapi kendala dalam proses perizinan penelitian di beberapa kelurahan

sehingga mempengaruhi proses pengumpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah desa terus meningkatkan pemahaman dan penerapan kejelasan sasaran anggaran, akuntansi sektor publik, serta pengendalian akuntansi melalui pembinaan, pengawasan, dan pelatihan bagi aparatur desa guna menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian serta menambah variabel lain yang berpotensi mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa agar hasil penelitian lebih luas dan dapat digeneralisasikan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta kontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini, khususnya kepada dosen pembimbing, instansi terkait, serta responden penelitian yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. REFERENSI

Azzahrani, T. N. (2024). Pengaruh Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak).

Febriani, D. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo).

Hawalya, N., Remmang, H., & Faridah. (2025). Pengaruh Kejelasan Sasaran

Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. *Journal Of Accounting, Finance And Sharia Accounting*, 3(1), 31–37.

Hidayat, T., Putri, A., & Murialti, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Kompetensi, Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi: Optimalisasi Zakat Dan Wakaf Dalam Membangun Ekonomi Indonesia*, 1, 87–97.

Loppies, F., Gasperz, J., & Limba, F. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Manajemen Indonesia (Jkemi)*, 1(1), 1–9.

Mubarok, R. Z., Rahmawati, T., & ... (2021). Pengaruh Pengawasan Internal Dan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Bppkad Kabupaten Brebes. *Journal Of Accounting ...*, 2(01), 45–55.

Okvita, S. A. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, Komitmen Manajemen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pelaporan, Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Sta.

Putra, P. A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Empiris Pada Organisasi Pera. *Jurnal*

Hukum, Administrasi Negara,
Perbankan Syariah Akuntansi, 474–492.

Rondonuwu, T. V., Kewo, C. L., & Evinita, L. (2023). Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kota Tomohon). *Jekma: Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 118–130.

Setiawan, D., & Ramdan, K. N. (2024). Pengaruh Realisasi Anggaran, Efisiensi Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Jisipol*, 8(3).

Silastuti, A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Kemampuan Kerja Dan Pengawasan

Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bayat).

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

Tandibua', I., Idris, M., & Faridah. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Access: Journal Of Accounting, Finance And Sharia Accounting*, 2(2), 122–127.

Wiyana, A., Sufiati, S., Sambo, E. M., & Nurasratunnisa, Y. (2023). Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Stie Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 240.